

**RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang komunikasi dan informatika, telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021. RENJA digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi RKPD Kabupaten Kediri tahun 2021.

Tujuan penyusunan RENJA ini adalah untuk memberikan arahan/panduan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri agar sesuai dengan perencanaan serta dapat menjadi panduan/ pedoman bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan dilaporkan di setiap akhir tahun dalam bentuk LKjIP dan LKPJ.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kediri, 21 Juli 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri**



**KRISNA SETIAWAN, S.AP, M.SI**  
Pembina/IVa  
NIP. 19840127 200604 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum ... ..	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD .....	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah .....	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN SKPD .....	45
BAB V. PENUTUP.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun.

RENJA SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. RENJA SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam RENJA SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam RENJA SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam RENJA SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Misi Pembangunan ke-13 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni “Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi” maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2021. Selanjutnya RENJA SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021



(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun 2021 ke depan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kediri.

Adapun maksud penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberi arah dan pedoman kepada setiap aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam menjalankan program selama tahun 2021 untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.
2. Menjadikan rencana kerja sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri di tahun 2021.
3. Merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik di tahun 2021 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait.
2. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
3. Memasukkan program/kegiatan yang ada di RENJA ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENJA DAN PENDANAAN SKPD**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra tahun 2019 ditampilkan pada tabel 2.1. dan 2.2.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan RPJMD 2016-2021 dan Tujuan RENSTRA SKPD**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target RPJMD	KINERJA			
				2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)
Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah kumulatif sistem informasi yang dibangun	4	12	4	14	350% dari target RPJMD Capaian total sampai tahun 2019 adalah 14 sistem aplikasi yang terbangun

Realisasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan RPJMD tahun 2016-2021 dan tujuan RENSTRA SKPD termasuk kategori berhasil. Tahun 2019, Dinas Kominfo membangun sistem informasi berupa 2 aplikasi yaitu JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan SIPGOL (Sistem Informasi Presensi Guru Online) menambah 12 sistem informasi yang sudah ada yaitu e-surat, sms center, SIPANSER (Sistem Informasi Pemantau Jaringan dan Server, *Dashboard Integrasi CCTV*, SINAU (Sistem Informasi Manajemen Penugasan), SILAT (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan), Website SKPD Aplikasi TI, Portal website PPID (Sistem Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi), SIMOTI (Sistem Informasi Manajemen Operasional TI), SIPID (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah), SILAB (Sistem Informasi Pelaporan Bandwidth), SINCAN (Sistem Informasi Kecamatan).

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA SKPD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018	2019		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government	Persentase SKPD yang berbasis e-government	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	20	21	20	95%
		Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	510 Mbps	1 Gbps	510 Mbps	51%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Persentase desa yang membentuk KIM	57,8%	100%	57,8%	57,8%
		Persentase PPID aktif pada SKPD	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	822/tahun	500/tahun	730/tahun	146%
		Jumlah update pada media pemerintah daerah	7 kali/hari	10 kali/per hari	10 kali/hari	100%
		Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab ( <i>content viewer</i> )	13,3jt/tahun	20jt/tahun	15,6jt/tahun	78%

Capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 :

1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government
  - a. Persentase SKPD yang berbasis e-Government mencapai 100%, menggambarkan seluruh SKPD sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. Dari 63 SKPD semuanya sudah memanfaatkan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai leading sector.
  - b. Jumlah ruang publik yang terlayani wifi sebanyak 20 titik, sama dengan tahun lalu, atau mencapai 95% dari yang ditargetkan di tahun 2019 sebanyak 21.
  - c. Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab yang ditargetkan 1Gbps tercapai 51% yaitu 510 Mbps, sama seperti tahun 2018. Meskipun secara kinerja mencapai 51% dari target namun tingkat kecepatan ini sudah memenuhi kebutuhan layanan bandwidth dan mampu mendukung kinerja sistem informasi yang ada di Kabupaten Kediri secara keseluruhan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
  - a. Persentase desa yang membentuk KIM mencapai 57,8%. Saat ini kegiatan KIM lebih difokuskan pada pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada, untuk memaksimalkan potensinya.
  - b. Persentase PPID aktif pada SKPD sebesar 100%. Semua SKPD di Pemkab Kediri sudah memiliki PPID Pembantu dan berfungsi dalam layanan informasi publik.

Namun permintaan informasi memang lebih banyak dilakukan masyarakat langsung ke PPID Utama yang ada di Dinas Kominfo.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
  - a. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi mencapai 146%. Dari yang ditargetkan 500/tahun terealisasi 730/tahun.
  - b. Jumlah update pada media pemerintah daerah terealisasi sebesar 100%. Jika di tahun 2018 rata-rata jumlah update publikasi di media pemerintah 7 kali per hari tahun 2019 bisa mencapai 10 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter yang juga aktif digunakan selain website pemerintah.
  - c. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (*content viewer*) di tahun 2019 terealisasi 78% dari yang ditargetkan 20jt/tahun. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2018, yaitu dari 13,3jt/tahun menjadi 15,6jt/tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disajikan dalam tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D TAHUN 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target kinerja	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	- - - -									
<b>2.10 . 2.10.1 . 01</b>	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Capaian Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.01.01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.02	2 . Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.07	3 . Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa adminstrasi Keuangan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.08	4 . Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.10	5 Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.11	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.13	7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.14	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan peralatan rumah tangga yang diadakan	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%

2.10.01.01.15	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.17	10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan	72 kali	36 kali	-	-	-	-	36 kali	50%
2.10.01.01.08	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	720 kali	360 kali	-	-	-	-	360 kali	50%
2.10.01.01.19	12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	waktu penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.20	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1440 kali	720 kali	-	-	-	-	720 kali	50%
2.10.01.01.22	14	Penyediaan Jasa Operasional	waktu penyediaan jasa operasional	72 bulan	236bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10.01.01.23	15	Penyediaan jasa administrasi barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi barang	12 orang	4 org	-	-	-	-	6 org	50%
2.10.01.01.24	16	Penyedia Jasa Keamanan Kantor	waktu penyediaan jasa keamanan kantor keamanan kantor	72 bulan	12 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10 . 2.10.1 . 01 . 30	17	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran	36 bulan	-	12	12	100%	12 bulan	24 bulan	66%
2.10 . 2.10.1 . 01 . 31	18	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	36 bulan	-	12	12	100%	12 bulan	24 bulan	66%
<b>2.10 . 2.10.1 . 02</b>	<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.02.22	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	-	1 gedung	100%
2.10.01.02.24	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
2.10.01.02.33	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	36 bln	-	-	-	-	36 bulan	50%
2.10 . 2.10.1 . 02 . 45	4	Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar	Tempat parkir/taman/pagar yang direhap	2 paket	-	2 paket	2 paket	100%	-	-	100%
2.10 . 2.10.1 . 02 . 55	5	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Peralatan dan perlengkapan yang tersedia/terpelihara	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
<b>2.10.01.05</b>	<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase keikutsertaan aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.05.04	1	Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.05.05	2	Akreditasi Tenaga Fungsional	Persentase tenaga fungsional yang diakreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>2.10 . 2.10.1 . 06</b>	<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.06.01	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan realisasi kinerja SKPD	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.04	2	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir	Jumlah pelaporan keuangan akhir	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.06	3	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan LKJIP	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.07	4	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah Laporan Renja	6 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	33%
2.10.01.06.15	5	Penyusunan Rencana Strategis dan/ayau LKPJ SKPD	Jumlah Laporan Renstra	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100%
2.10.01.06.20	6	Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Terpadu	Persentase pelaksanaan pengembangan sistem layanan informasi terpadu	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100%
2.10 . 2.10.1 . 06 . 21	7	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	15 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	10 dokumen	66%
<b>2.14 . 2.10.1 . 15</b>	<b>5</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>100%</b>							
2.14 . 2.10.1 . 15 . 14	1	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	3 paket buku	1 paket buku	1 paket buku	1 paket buku	100%	1 paket buku	3 paket buku	100%
2.14 . 2.10.1 . 15 . 17	2	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	2 kajian	-	1 kajian	1 kajian	100%	1 kajian	2 kajian	100%
<b>2.10 . 2.10.1 . 15</b>	<b>6</b>	<b>Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa</b>	<b>Persentase pengembangan komunikasi ,informasi dan media massa</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.15.02	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.15.03	2	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persentase pelaksanaan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.15.06	3	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Persentase pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.15.12	4	monitoring dan evaluasi warnet	Jumlah Movev yang dilakukan	6 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.15.13	5	Pembinaan dan pengembangan internet	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan internet	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
		Monitoring dan evaluasi LCKK IKM									
		Pembangunan Media Center									



		Pembangunan Data Warehouse									
		Pembangunan Hotspot									
		Upgrade P2P Pemda-Kominfo									
		Upgrade Website Pemerintah Daerah									
2.10.01.15.16	6	Pembangunan data center	Jumlah paket pengadaan Sistem Informasi Software								
2.10 . 2.10.1 . 15 . 26	7	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM teknologi informasi	50 kali	26 kali	20 kali	20 kali	100%	10 kali	56 kali	112%
<b>2.10.01.16</b>	<b>7</b>	<b>Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>	<b>Persentase masyarakat yang memahami telecenter</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.16.01	1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	Pendampingan telecenter	jumlahpelaksanaan pendampingan telecenter	100%	-	-	-	-	-	-
2.10.01.16.03	3	Rekayasa Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Persentase pelaksanaan aplikasi sistem keamanan teknologi informasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.16.04	4	Rekayasa Aplikasi E-Government	Persentase rekayasa aplikasi E-Government	100%	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.10.01.16</b>	<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase terpenuhinya SIMPDU Online</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.16.04	1	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase terpenuhinya SIMPDU Online	100%	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.10 . 2.10.1 . 17</b>	<b>9</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>100%</b>							
2.10 . 2.10.1 . 17 . 01	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	12 kali	6 kali	18 kali	18 kali	100%	4 kali	28 kali	230%
2.10.01.17.05	2	Sarasehan/Jumpa Pres	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	33,33%
2.10.01.17.09	3	Seminar situasi kondisi kebijakan pemerintah	Jumlah seminar yang diselenggarakan	6 Kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	33,33%
2.10 . 2.10.1 . 17 . 11	4	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	20 kali	11 kali	19 kali	19 kali	100%	4 kali	34 kali	170%
2.10.01.17.13	5	Workshop teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	-	-	-	-	-	-	-

2.10.01.17.14	6	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Teknologi Informasi	Jumlah monev yang dilakukan	144 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.17.15	7	Workshop dan Sosialisasi E-Government	Jumlah workshop dan sosialisasi yang diselenggarakan	12 kali	-	-	-	-	-	-	-
	8	Study Banding									
	9	Pembinaan dan pengembangan SDM Komunikasi dan Informasi									
	10	Pelatihan SDM di Bidang Jurnalistik									
	11	Seminar penyebarluasan Informasi Program dan Hasil Pembangunan Kab.Kediri									
2.10 . 2.10.1 . 17 . 17	12	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Jumlah pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	20 kali	5 kali	9 kali	9 kali	100%	5 kali	19 kali	95%
2.10 . 2.10.1 . 17 . 18	13	Penyeberluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pertemuan Bakoinmas	20 kali	5 kali	2 kali	2 kali	100%	4 kali	11 kali	55%
2.10 . 2.10.1 . 17 . 26	14	Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival	100 kali	44 kali	65 kali	65 kali	100%	20 kali	129 kali	129%
<b>2.10 . 2.10.1 . 18</b>	<b>10</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>	<b>Persentase kerjasama dengan Mass Media</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.18.01	1	Penyebarluasan Informasi dengan Mass Media	Keikutsertaan dalam Pameran Pekan KIM Propinsi dan Diseminasi Informasi			100%	100%	100%	100%	100%	100
2.10.01.18.14	2	Pembinaan pimpinan Radio komunikasi /swasta/niaga	Jumlah pembinaan yang dilakukan	12 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	50%
2.10.01.18.15	3	Penyebarluasan informasi melalui leflet/brosur/stiker/spanduk program pemerintah	Persentase penyebarluasan informasi melalui leflet/brosur/stiker/spanduk program pemerintah	98%	100%	-	-	-	-	-	98%
	4	Penyampaian ketentuan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau		-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.18	5	Persiapan Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	6 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.19	6	Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.20	7	sarasehan/coffe morning	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	12 kali	3 kali	-	-	-	-	-	33%
2.10.01.18.25	8	pembinaan SDM ORARI dan RAPI	Persentase pembinaan SDM ORARI dan RAPI	100%	100%	-	-	-	-	-	100%

2.10.01.18.27	9	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik	Persentase penyebarluasan informasi melalui media masa elektronik	98%	93%	-	-	-	-	-	98%
2.10.01.18.31	10	Pemberian informasi kepada Lembaga Non Pemerintah	Persentase pemberian informasi kepada lembaga Non Pemerintah	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.32	11	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.33	12	Penyebarluasan Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	Persentase penyebarluasan informasi isu strategis di Kab.Kediri	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.10.01.18.02	13	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.18.04	14	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Persentase penyebarluasan informasi penyuluhan bagi pemerintah daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.18.05	15	Penyebarluasan informasi melalui siaran radio daerah	Persentase penyebarluasan informasi melalui siaran radio daerah	95%	100%	-	-	-	-	-	95%
2.10.01.18.06	16	Penyebarluasan informasi melalui pemutaran film	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	6 kali	3 kali	-	-	-	-	3 kali	50%
2.10.01.18.07	17	Penyebarluasan informasi melalui peliputan penerbitan majalah kominfo	Persentase penyebarluasan informasi melalui peliputan penerbitan majalah kominfo	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10.01.18.08	18	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah di Tingkat Kabupaten	Persentase penyebaran informasi pembangunan daerah di tingkat Kabupaten	96%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 10	19	Peliputan kegiatan pembangunan di Kab.Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	3650	1460	730	730	100%	730	2920	80%
2.10.01.18.11	28	Pameran Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	6 kali	3 kali	-	-	-	-	3 kali	50%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 32	29	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	180 media	135 media	80 media	90 media	112%	42 media	267 media	148%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 34	30	Diseminasi informasi publik	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik	120 media	45 media	55 media	55 media	100%	37 media	137 media	114%
2.10 . 2.10.1 . 18 . 35	31	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat	20	11	10	9	90%	6	26	130%
<b>2.10 . 2.10.1 . 20</b>	<b>11</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi Informasi</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.20.01	1	Layanan Jasa Bandwidth	Persentase pelaksanaan layanan jasa bandwidth	90%	90%	-	-	-	-	90%	100%
2.10 . 2.10.1 . 20 . 04	2	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	90%	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%
2.10.01.20.05	3	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Persentase pengembangan aplikasi sistem keamanan teknologi Informasi	90%	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%

2.10.01.20.06	4	Pemeliharaan Aplikasi E-Government	Persentase pemeliharaan Aplikasi E-Government	90%	-	-	-	-	-	90%	100%
2.10.01.20.07	5	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Persentase pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	90%	3 paket	-	-	-	1 paket	100%	100%
<b>2.10 . 2.10.1 . 21</b>	<b>12</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	<b>Persentase pengembangan E-Government</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.21.03	1	Pengelolaan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan domain dan sub-domain pemerintah daerah	90%	100%	-	-	-	-	100%	100%
2.10.01.21.05	2	Monitoring dan evaluasi Sistem Informasi dan Aplikasi E-Government	Persentase monitoring dan evaluasi sistem Informasi dan Aplikasi E-Government	90%	100%	-	-	-	-	100%	100%
2.10.01.21.06	3	Pengelolaan E-Government	Persentase Pengelolaan E-Government	90%	100%	-	-	-	-	100%	100%
2.10 . 2.10.1 . 21 . 07	4	Rekayasa Aplikasi E-government	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	80%
2.10 . 2.10.1 . 21 . 11	5	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government	Pembelian bandwidth dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
2.10 . 2.10.1 . 21 . 13	6	Sosialisasi sistem informasi	Jumlah sosialisasi sistem informasi	50 kali	-	28 kali	28 kali	100%	7 kali	35 kali	75%
<b>2.10.01.22</b>	<b>13</b>	<b>Program Pengembangan Data Center</b>	<b>Persentase pengembangan data center</b>	<b>100%</b>							
2.10.01.22.05	1	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Elektronik	Jumlah Monev yang dilakukan	144 kali	1 kali	-	-	-	-	-	-
	2	Pembangunan Data Center		100%	-	-	-	-	-	-	-

Kediri, - - 2020

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KEDIRI

**KRISNA SETIAWAN, SAP., MSi.**

Pembina/IVa

NIP.19840127 200604 1 005

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menetapkan 9 (sembilan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan pada tahun 2019. Berikut ini target dan realisasi anggaran tahun 2019.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2019**

NO.	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.819.170.000</b>	<b>1.707.646.907</b>	<b>93,87</b>	<b>DAU</b>
1.	Pelaksanaan administrasi perkantoran	1.378.425.000	1.298.838.074	94,23	DAU
2.	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	440.745.000	408.808.833	92,75	DAU
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>942.250.000</b>	<b>839.164.652</b>	<b>89,06</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.	Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar	224.000.000	215.625.600	96,26	DAU dan Pajak Rokok
2.	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	718.250.000	623.539.052	86,81	DAU
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>35.640.000</b>	<b>12.848.600</b>	<b>36,05</b>	<b>DAU</b>
1.	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	35.640.000	12.848.600	36,05	DAU
<b>D.</b>	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa</b>	<b>2.072.300.000</b>	<b>1.656.143.500</b>	<b>79,92</b>	<b>Pajak Rokok</b>
1.	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	2.072.300.000	1.656.143.500	79,92	Pajak Rokok
<b>E.</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>678.800.000</b>	<b>649.586.856</b>	<b>95,70</b>	<b>DAU</b>
1.	Publikasi informasi data statistik daerah	411.400.000	384.973.421	93,58	DAU
2.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	267.400.000	264.613.435	98,96	DAU
<b>F.</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>5.316.644.500</b>	<b>5.217.846.200</b>	<b>98,14</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	589.477.500	583.969.500	99,07	DAU
2.	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	795.260.000	789.075.600	99,22	DAU dan Pajak Rokok

NO.	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
3.	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	405.345.000	391.420.000	96,56	DAU
4.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	151.660.000	150.698.100	99,37	DAU
5.	Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	3.374.902.000	3.302.683.000	97,86	DAU dan Pajak Rokok
<b>G.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>10.436.325.000</b>	<b>10.349.173.500</b>	<b>99,16</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri	163.700.000	159.240.000	97,28	DAU dan Pajak Rokok
2.	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4.379.290.000	4.360.943.500	99,58	DAU
3.	Diseminasi informasi publik	4.830.970.000	4.824.000.000	99,86	DAU dan Pajak Rokok
4.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	1.062.365.000	1.004.990.000	94,60	DAU dan Pajak Rokok
<b>H.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>3.758.174.500</b>	<b>3.519.059.468</b>	<b>93,64</b>	<b>DAU</b>
1.	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	3.126.174.500	2.926.932.403	93,63	DAU
2.	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	632.000.000	592.127.065	93,69	DAU
<b>I.</b>	<b>Program Pengembangan e-Government</b>	<b>4.183.845.927</b>	<b>3.958.021.000</b>	<b>94,60</b>	<b>DAU dan Pajak Rokok</b>
1.	Rekayasa Aplikasi e-government	104.000.000	100.365.000	96,50	DAU
2.	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government	3.036.245.927	3.022.426.000	99,54	DAU
3.	Sosialisasi sistem informasi	1.043.600.000	835.230.000	80,03	DAU dan Pajak Rokok
	<b>TOTAL</b>	<b>29.243.149.927</b>	<b>27.909.490.683</b>	<b>95,44</b>	

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Outcome Program/Output Kegiatan Dinas Kominfo**  
**Tahun 2019**

NO.	KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	100%
2.	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Cakupan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bln	12 bln	100%
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>111%</b>
1.	Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar	Jumlah pembuatan parkir/taman/pagar	2 paket	2 paket	100%
2.	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	1 paket	1 paket	100%
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
<b>D.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
1.	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	20 kegiatan	20 kegiatan	100%
<b>E.</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
1.	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	1 buku statistik	1 buku statistik	100%
2.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	1 laporan kajian	1 laporan kajian	100%
<b>F.</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	18 kegiatan	18 kegiatan	100%
2.	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	19 kegiatan	19 kegiatan	100%
3.	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Jumlah pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	9 kegiatan	9 kegiatan	100%

NO.	KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Bakoinmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
5.	Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri melalui pertunjukan rakyat dan festival	65 isu strategis	65 isu strategis	100%
<b>G.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>Persentase kerjasama dengan mass media</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
1.	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	730 liputan	730 liputan	100%
2.	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	80 media cetak	90 media cetak	112%
3.	Diseminasi informasi publik	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik	55 media elektronik	55 media elektronik	100%
4.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	10 kegiatan	9 kegiatan	90%
<b>H.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Prosentase peningkatan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
1.	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	1 paket	1 paket	100%
2.	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	12 bulan	12 bulan	100%
<b>I.</b>	<b>Program Pengembangan e-Government</b>	<b>Prosentase pengembangan E-Government</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
1.	Rekayasa Aplikasi e-government	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	1 paket	1 paket	100%
2.	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government	Pembelian bandwidth dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi	12 bulan	12 bulan	100%
3.	Sosialisasi sistem informasi	Jumlah sosialisasi sistem informasi	13 kegiatan	13 kegiatan	100%

Dari data pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo secara umum relatif sesuai dengan target, sasaran, tujuan, jadwal dan penganggaran yang direncanakan.



2. Kinerja Dinas Kominfo ditinjau dari aspek realisasi anggaran sudah mencapai 93,73% yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sampai bulan Desember 2019 sudah cukup efektif dan efisien.
3. Ditinjau dari aspek pelaksanaan kegiatan, hampir semua kegiatan dari seluruh program yang ada sudah dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran baik sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri maupun sasaran kinerja Dinas Kominfo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja merupakan keberhasilan dari Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas di bidang informasi dan komunikasi.
5. Ditinjau dari aspek keorganisasian Dinas Komunikasi dan Informatika meskipun telah cukup efektif dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan sumberdaya yang tersedia cukup baik dari sisi ketersediaan anggaran, sumber daya

Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri**

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Web site milik pemerintah daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	www.kedirikab.go.id
2	% Ketersediaan Infrastruktur jaringan			2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	-
3	% Ketersediaan sistem Informasi (aplikasi)			4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	12 Aplikasi	14 Aplikasi	14 Aplikasi	14 aplikasi	Melebihi target RPJMD
4	% Ketersediaan Data Induk di Bidang TIK			0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	% Kecukupan SDM di bidang TIK			7 orang	8 orang	10 orang	20 orang	10 Orang	20 orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang dibutuhkan
6	% Jumlah Titik koneksi yang terhubung dengan jaringan Internet			100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	100 titik koneksi	120 titik koneksi	120 titik koneksi	120 yang dibutuhkan
7	Jumlah surat kabar nasional/lokal			7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	Masih sama
8	% Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui kerjasama			68 kerjasama	70 kerjasama	75 kerjasama	75 kerjasama	65 kerjasama	75 kerjasama	75 kerjasama	80 kerjasama	

9	% Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui media milik pemerintah.			2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	5 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	5 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	5 penyebaran Inkom dan media massa melalui media milik pemerintah	Meningkat dengan bertambahnya media seperti media sosial youtube, FB, Instagram dan juga TV streaming Kediri Lagi TV
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Kediri, - - 2020

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri

**KRISNA SETIAWAN, S.AP., M.Si**

Pembina/IV-a

NIP. 19840127 200604 1 005

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo memiliki peran strategis antara lain sebagai berikut :

- 1) Dinas Kominfo memiliki tugas pokok dan fungsi membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi Kabupaten Kediri. Dinas Kominfo berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Kediri sebagai smart city melalui layanan publik berbasis online dan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Dinas Kominfo berperan penting dalam diseminasi informasi dan publikasi, tidak hanya melalui media massa, media offline tetapi juga media online berbasis internet seperti mempublikasikan informasi – informasi publik melalui website, media sosial.
- 3) Dinas Kominfo menjalankan fungsi – fungsi Pemberdayaan Mass Media, Penerbitan dan Informasi Mobile sehingga memiliki pengaruh kuat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan melalui media – media massa tersebut.
- 4) Dinas Kominfo menjalankan fungsi Pemberdayaan Informasi Masyarakat melalui media – media Bakoinmas, Pertunjukan Rakyat, Siaran Radio, dan Pemutaran Film. Melalui media – media itu, Dinas Kominfo dapat menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan dan pemerintahan kepada elemen – elemen masyarakat hingga ke desa – desa.
- 5) Sesuai dengan Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik, Dinas Kominfo menjadi sekretaris dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2021 seperti ditampilkan dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Kediri**

**Nama Perangkat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri**

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.984.266.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.984.266.000</b>	
1	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Ds. Doko, Ngasem	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	1.837.780.000	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Ds. Doko, Ngasem	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	1.837.780.000	
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Luar dan dalam Kabupaten Kediri	Cakupan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bulan	146.486.000	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Luar dan dalam Kabupaten Kediri	Cakupan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bulan	146.486.000	
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>	<b>100%</b>	<b>250.856.665</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>	<b>100%</b>	<b>250.856.665</b>	
1	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Ds. Doko, Ngasem	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	12 bulan	250.856.665	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Ds. Doko, Ngasem	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	12 bulan	250.856.665	
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>9.000.000</b>	
1	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	5 laporan	9.000.000	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	5 laporan	9.000.000	

<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>		<b>Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>	<b>100%</b>	<b>165.500.000</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>		<b>Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>	<b>100%</b>	<b>165.500.000</b>	
1	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	14 kegiatan	165.500.000	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	14 kegiatan	165.500.000	
<b>V</b>	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>		<b>Persentase fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>95%</b>	<b>613.872.490</b>	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>		<b>Persentase fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>95%</b>	<b>613.872.490</b>	
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	4 kegiatan	38.830.000	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	4 kegiatan	38.830.000	
2	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	4 kegiatan	110.830.000	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	4 kegiatan	110.830.000	
3	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	5 kegiatan	63.020.000	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	5 kegiatan	63.020.000	
4	Penyeberluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan Bakoinmas	4 kegiatan	32.400.000	Penyeberluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah kegiatan Bakoinmas	4 kegiatan	32.400.000	
5	Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Kab. Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	20 kegiatan	368.792.490	Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Kab. Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	20 kegiatan	368.792.490	
<b>VI</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>		<b>Persentase kerjasama dengan mass media</b>	<b>100%</b>	<b>5.664.556.000</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>		<b>Persentase kerjasama dengan mass media</b>	<b>100%</b>	<b>5.664.556.000</b>	
1	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	730 liputan	178.700.000	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	730 liputan	178.700.000	

2	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	42 media cetak	1.647.491.000	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	42 media cetak	1.647.491.000	
3	Diseminasi informasi publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik dan online	37 media elektronik dan online	3.500.000.000	Diseminasi informasi publik	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik dan online	37 media elektronik dan online	3.500.000.000	
4	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kab. Kediri	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	6 kegiatan	338.365.000	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kab. Kediri	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	6 kegiatan	338.365.000	
<b>VII</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>		<b>Persentase peningkatan sosialisasi cukai dan wabah menular</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>		<b>Persentase peningkatan sosialisasi cukai dan wabah menular</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	
1	Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Kab. Kediri	Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah menular	4 media	500.000.000	Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Kab. Kediri	Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah menular	4 media	500.000.000	
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>		<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi</b>	<b>100%</b>	<b>609.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>		<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi</b>	<b>100%</b>	<b>609.000.000</b>	
1	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	6 paket	373.000.000	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	6 paket	373.000.000	
2	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	1 paket	211.000.000	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	1 paket	211.000.000	
3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur TI yang terbangun	1 paket	25.000.000	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah infrastruktur TI yang terbangun	1 paket	25.000.000	
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>		<b>Persentase pengembangan e-government</b>	<b>100%</b>	<b>2.910.698.000</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>		<b>Persentase pengembangan e-government</b>	<b>100%</b>	<b>2.910.698.000</b>	



1	Rekayasa Aplikasi E-government	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	1 paket	1.000.000	Rekayasa Aplikasi E-government	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	1 paket	1.000.000	
2	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sistem Informasi yang terpelihara	1 paket	2.879.598.000	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sistem Informasi yang terpelihara	1 paket	2.879.598.000	
3	Sosialisasi sistem informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sosialisasi sistem informasi	6 kegiatan	30.100.000	Sosialisasi sistem informasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Sosialisasi sistem informasi	6 kegiatan	30.100.000	
<b>X</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>		<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>100%</b>	<b>89.000.010</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>		<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>100%</b>	<b>89.000.010</b>	
1	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	1 paket buku	64.000.000	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	1 paket buku	64.000.000	
2	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	1 laporan kajian	25.000.010	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	1 laporan kajian	25.000.010	
<b>TOTAL</b>						<b>12.796.749.165</b>					

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri

**KRISNA SETIAWAN, S.AP., M.Si**

Pembina/IV-a

NIP. 19840127 200604 1 005

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Kajian usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pengumpulan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dilakukan dengan menghimpun usulan di acara Musrenbang dan usulan dari pihak-pihak terkait lainnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat disajikan dalam tabel 2.8.

Tabel 2.8

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Kediri**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Kegiatan: 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Desa Doko Luar dan dalam Kabupaten Kediri	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran Cakupan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	12 bln 12 bln	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Kegiatan : 1 Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Desa Doko, Kab. Kediri	<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>  Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	12 bln	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Desa Doko, Kab. Kediri	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	5 laporan	
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b> Kegiatan : 1 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Desa Doko, Kab. Kediri	<b>Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>  Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	14 kegiatan	
<b>5</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b> Kegiatan : 1 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Desa Doko, Kab. Kediri	<b>Persentase fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>  Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	4 kegiatan	

	2 Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	4 kegiatan	
	3 Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	5 kegiatan	
	4 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah kegiatan Bakoinmas	4 kegiatan	
	5 Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	Desa Doko dan wilayah Kab. Kediri	Jumlah Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri	20 kegiatan	
<b>6</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b> Kegiatan :		<b>Persentase kerjasama dengan mass media</b>		
	1 Peliputan kegiatan pembangunan di Kab.Kediri	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	730 liputan	
	2 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	42 media cetak	
	3 Diseminasi Informasi Publik	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik dan online	37 media elektronik dan online	
	4 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	6 kegiatan	
<b>7</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>				
	1. Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah penyakit menular	4 media	
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b> Kegiatan :		<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi</b>		
	1 Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	6 paket	
	2 Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Desa Doko, Kab. Kediri	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	12 bulan	

9	3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Kab Kediri	Jumlah infrastruktur TI yang terbangun	1 paket	CCTV
	<b>Program Pengembangan E-Government</b>			<b>Prosentase pengembangan E-Government</b>		
	Kegiatan :					
10	1	Rekayasa Aplikasi E-Government	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	1 paket	
	2	Pengelolaan dan Pemeliharaan Layanan E-Government	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah Sistem Informasi yang terpelihara	1 paket	
	3	Sosialisasi Sistem Informasi	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi	6 kegiatan	
	<b>Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>			<b>Persentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>		
	Kegiatan :					
1	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	1 paket buku	Kediri dalam Angka	
2	Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Desa Doko, Kab. Kediri	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	1 laporan kajian	SPBE	

Kediri, - - 2020  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KEDIRI

**KRISNA SETIAWAN, SAP., M.Si.**  
 Pembina/IVa  
 NIP.19840127 200604 1 005

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk mendukung fokus pembangunan nasional khususnya dalam hal digitalisasi nasional, pemerintah mengakselerasi penguatan teknologi digital, yang meliputi pembangunan infrastruktur teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta komunikasi publik. Arah kebijakan bidang komunikasi dan informatika dilakukan dengan 4 strategi utama, meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Selaras dengan kebijakan nasional, arah kebijakan pembangunan bidang informasi dan komunikasi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, yang digunakan sebagai acuan perencanaan tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan publik yang berbasis e-Government melalui penataan kelembagaan, pembangunan infrastruktur dan sistem aplikasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang lebih aktif dan profesional untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi public
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi desa melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
4. Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media pemerintah, media massa, maupun media social
5. Pemberdaan informasi masyarakat melalui publikasi isu-isu strategis dalam kegiatan Bakoinmas, pertunjukan rakyat, atau festival.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
3. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
7. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
8. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Strategi yang ditempuh untuk menjalankan tupoksi tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan koordinasi/ konsultasi secara vertikal/ horisontal dalam rangka penyusunan program penyelenggaraan komunikasi dan informatika serta urusan statistik;
2. Peningkatan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penataan secara kelembagaan, infrastruktur, dan aplikasi;
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui pelatihan dan sosialisasi;
4. Peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui peran PPID;
5. Penyebarluasan isu strategis melalui kesenian dan budaya;
6. Pelaksanaan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;

7. Peningkatan kerjasama media massa baik media cetak, media elektronik maupun portal online untuk mendukung publikasi dan diseminasi informasi
8. Memaksimalkan fungsi media pemerintah website dan media sosial untuk mendukung penyebarluasan informasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1 Tujuan**

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”, dan menjalankan misi ke-13 Bupati Kediri yaitu “Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.”

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kediri adalah “Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi.”

Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri bidang informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD yaitu “Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah”.

#### **3.2.2 Sasaran**

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government

##### *Indikator Kinerja Sasaran :*

- Persentase OPD yang berbasis e-government
- Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi
- Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab



2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

*Indikator Kinerja Sasaran :*

- Persentase desa yang membentuk KIM
- Persentase PPID aktif pada OPD

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah

*Indikator Kinerja Sasaran :*

- Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi
- Jumlah update pada media pemerintah daerah
- Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kediri termasuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, maka langkah-langkah operasional strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dituangkan ke dalam program-program komunikasi dan informasi serta program statistik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Program tersebut berisi satu atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 yaitu sebanyak 10 program dan 23 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Pelaksanaan administrasi perkantoran
  - b. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
  - a. Publikasi informasi data statistik daerah
  - b. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
  - a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi
6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - a. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
  - b. Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  - c. Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah
  - d. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - e. Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
  - a. Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kediri
  - b. Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - c. Diseminasi informasi publik
  - d. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
8. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
  - a. Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kediri Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
  - a. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
  - b. Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi
  - c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
10. Program Pengembangan e-Government
  - a. Rekayasa Aplikasi e-government
  - b. Pengelolaan dan pemeliharaan layanan e-Government
  - c. Sosialisasi sistem informasi

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebesar Rp. 12.796.749.165,- dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kabupaten Kediri**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.10.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.984.266.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.926.954.000</b>
2.10.01.30	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Ds. Doko, Ngasem	12 bulan	1.837.780.000	APBD		12 bulan	1.549.200.000
2.10.01.31	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Ds. Doko, Ngasem	12 bulan	146.486.000	APBD		12 bulan	377.754.000
<b>2.10.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>		<b>100%</b>	<b>250.856.665</b>			<b>100%</b>	<b>288.750.000</b>
2.10.02.55	Penyediaan/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	Ds. Doko, Ngasem	12 bulan	250.856.665	APBD		12 bulan	288.750.000
<b>2.10.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>37.422.000</b>
2.10.06.21	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	Ds. Doko, Ngasem	5 laporan	9.000.000	APBD		5 laporan	37.422.000

<b>2.10.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Prosentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>		<b>95%</b>	<b>165.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>803.775.000</b>
2.10.15.26	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia teknologi informasi	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	Ds. Doko, Ngasem	14 kegiatan	165.500.000	Pajak Rokok		14 kegiatan	803.775.000
<b>2.10.17</b>	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>Presentase fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>		<b>95%</b>	<b>613.872.490</b>			<b>100%</b>	<b>1.575.149.500</b>
2.10.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Ds. Doko, Ngasem	4 kegiatan	38.830.000	APBD		4 kegiatan	137.389.500
2.10.17.11	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	Ds. Doko, Ngasem	4 kegiatan	110.830.000	APBD		4 kegiatan	180.337.500
2.10.17.17	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Ds. Doko, Ngasem	5 kegiatan	63.020.000	APBD		5 kegiatan	199.111.500
2.10.17.18	Penyeberluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Bakoinmas	Ds. Doko, Ngasem	4 kegiatan	32.400.000	APBD			179.403.000
2.10.17.26	Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Kab. Kediri	26 kegiatan	368.792.490	Pajak Rokok		26 kegiatan	878.908.000
<b>2.10.18</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mass media</b>	<b>Presentase kerjasama dengan mass media</b>		<b>95%</b>	<b>5.664.556.000</b>			<b>100%</b>	<b>6.193.565.000</b>
2.10.18.10	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	Wilayah Kab. Kediri	730 liputan	178.700.000	APBD		730 liputan	187.635.000

2.10.18.32	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	Ds. Doko, Ngasem	42 media cetak	1.647.491.000	APBD		42 media cetak	2.963.465.000
2.10.18.34	Diseminasi informasi publik	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik dan online	Ds. Doko, Ngasem	37 media elektronik dan online	3.500.000.000	Pajak Rokok		37 media elektronik dan online	2.546.367.000
2.10.18.35	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	Wilayah Kab. Kediri	6 kegiatan	338.365.000	Pajak Rokok		6 kegiatan	496.098.000
<b>2.10.19</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Persentase peningkatan sosialisasi cukai dan wabah menular</b>		<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
2.10.19.02	Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah menular	Kab. Kediri	4 media	500.000.000	Cukai		4 media	500.000.000
<b>2.10.20</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Presentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi</b>		<b>95%</b>	<b>609.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.563.975.000</b>
2.10.20.04	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	Ds. Doko, Ngasem	6 paket	373.000.000	APBD		6 paket	1.160.775.000
2.10.20.05	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	211.000.000	APBD		1 paket	376.950.000
2.10.20.07	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur TI yang terbangun	Kab. Kediri	1 paket	25.000.000	APBD		1 paket	26.250.000
<b>2.10.21</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	<b>Presentase pengembangan e-government</b>		<b>90%</b>	<b>2.910.698.000</b>			<b>100%</b>	<b>3.535.550.000</b>
2.10.21.07	Rekayasa Aplikasi E-government	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	1.000.000	APBD		1 paket	111.300.000
2.10.21.11	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government	Jumlah Sistem Informasi yang terpelihara	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	2.879.598.000	APBD		1 paket	3.023.950.000

2.10.21.13	Sosialisasi sistem informasi	Jumlah Sosialisasi sistem informasi	Ds. Doko, Ngasem	6 kegiatan	30.100.000	APBD		6 kegiatan	400.300.000
<b>2.14.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Presentase publikasi data statistik</b>		<b>100%</b>	<b>89.000.010</b>			<b>100%</b>	<b>327.180.000</b>
2.14.15.14	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	Ds. Doko, Ngasem	1 paket	64.000.000	APBD		1 paket	212.205.000
2.14.15.17	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	Ds. Doko, Ngasem	1 laporan kajian	25.000.010	APBD		1 laporan kajian	114.975.000
<b>TOTAL</b>					<b>12.796.749.165</b>				

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri

KRISNA SETIAWAN, S.AP., M.Si  
Pembina/IV-a  
NIP. 19840127 200604 1 005

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 yang telah di-input ke dalam aplikasi *e-planning* ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Belanja Langsung
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.984.266.000</b>
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.837.780.000
2	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	146.486.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presentase penanganan sarana prasarana aparatur yang memerlukan pemeliharaan</b>	<b>250.856.665</b>
1	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	250.856.665
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>9.000.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	9.000.000
<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Presentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>	<b>165.500.000</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan internet dan peningkatan SDM Teknologi Informasi	165.500.000
<b>V</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Presentase fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>613.872.490</b>
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	38.830.000
2	Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah kegiatan sinkronisasi PPID	110.830.000
3	Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah	63.020.000
4	Penyeberluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Bakoimas	32.400.000



5	Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	Jumlah penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri	368.792.490
<b>VI</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>Presentase kerjasama dengan mass media</b>	<b>5.664.556.000</b>
1	Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri	Jumlah acara/kegiatan pembangunan di Kabupaten Kediri yang diliput	178.700.000
2	Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media Cetak	1.647.491.000
3	Diseminasi informasi publik	Jumlah diseminasi informasi publik melalui media elektronik dan online	3.500.000.000
4	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat	338.365.000
<b>VII</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Persentase peningkatan sosialisasi cukai dan wabah menular</b>	<b>500.000.000</b>
1	Penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan wabah penyakit menular kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Cukai dan wabah menular	500.000.000
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Presentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi</b>	<b>609.000.000</b>
1	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dipelihara	373.000.000
2	Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Pengamanan fasilitas teknologi informasi	211.000.000
3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur TI yang terbangun	25.000.000
<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan E-Government</b>	<b>Persentase pengembangan E-Government</b>	<b>2.910.698.000</b>
1	Rekayasa Aplikasi E-government	Jumlah pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi	1.000.000
2	Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-Government	Jumlah Sistem Informasi yang terpelihara	2.879.598.000
3	Sosialisasi sistem informasi	Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi	30.100.000
<b>X</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Persentase publikasi data statistik</b>	<b>89.000.010</b>
1	Publikasi Informasi Data Statistik Daerah	Jumlah Buku Laporan Statistik Hasil Pembangunan Daerah	64.000.000
2	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah laporan hasil kajian bidang informasi dan komunikasi	25.000.010
<b>JUMLAH</b>			<b>12.796.749.165</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja 2021 ini akan dijadikan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang akuntabel, terukur, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) yang optimal. Dalam penyusunan dokumen ini tentunya berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2016-2021.

Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kediri, 21 Juli 2021



BUPATI KEDIRI

**HARYANTI SUTRISNO**

